

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK



RENCANA KERJA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 dapat diselesaikan. Substansi Renja Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan. Dimana dalam Renstra tersebut dimuat, Strategi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Perubahan Renja adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap rencana kerja pembangunan daerah. Selanjutnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan sehingga dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi pembangunan kegiatan perhubungan di Kabupaten Solok.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perhubungan adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Solok.

Koto Baru, 01 September 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19760102 199703 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II .EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
		.
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Solok	8
3.1.	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Solok	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perhubungan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Renja perubahan Dinas Perhubungan 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Perhubungan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Perhubungan tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan; pembahasan Rancangan Renja Dinas Perhubungan; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan.

Terkait dengan Dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 sebagai pedoman utama penyusunan Renja OPD, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan OPD harus benar-benar bisa menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, dan Program Unggulan Daerah. Selain itu, Renja Dishub harus bisa memberikan kontribusi penuntasan isu strategis daerah, mewadahi dan menterjemahkan pokok-pokok pikiran DPRD, serta Meyelaraskan hasil pemikiran dan usulan masyarakat dalam forum diskusi pembangunan daerah (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pendanaannya. Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari dokumen RPJMD dan Rencana Strategis SKPD, yang kemudian akan dituangkan draf rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD. Draft rancangan Renja SKPD inilah yang akan dibawa pada pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD serta mengakomodir hasil dari Musrenbang tersebut. Hasil perumusan akhir rancangan RKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati dan Rencana Kerja SKPD menjadi Dokumen Renja SKPD.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, dimana arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok dituangkan melalui program dan kegiatan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dan dijabarkan ke dalam Renja SKPD setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renja ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD dan Renstra melalui pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagaimana dijabarkan pada Rencana Kerja SKPD. Dan hubungannya dengan Renja Kementerian/Lembaga terkait dan Renja propinsi dengan adanya sinergitas antara ketiga dokumen perencanaan kerja (Renja) tersebut.

1.2. Landasan Hukum.

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok

- Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 22. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah :

1. Acuan Dinas Perhubungan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok selama tahun 2023.
3. Acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok terhadap pencapaian target yang ditetapkan dalam rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL
 DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Dinas Perikanan dan Pangan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra-PD Perangkat Daerah (Tahun n-1), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan turunan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Perubahan, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dinas Perhubungan menyelenggarakan 3 Program , 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan urusan Perhubungan pada Tahun 2023 dengan anggaran awal **Rp 9,145,446,443**. Pada Bulan Mei 2023 terdapat refocusing anggaran dan anggaran Dinas Perhubungan berkurang sebesar **Rp. 215,556,440**. Sehingga pagu anggaran Dinas Perhubungan berubah menjadi sebesar **Rp. 8,929,890,003** dan realisasi pada Triwulan II sebesar **Rp. 3,653,202,761**. Rata-rata kinerja Program SKPD adalah sebesar **41%** dengan realisasi fisik sebesar **50%**.

Berikut Faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut Program pada Dinas Perhubungan :

a. Faktor Pendukung :

1. Pelaksanaan Kegiatan terlaksana sesuai dengan time schedule yang telah di susun;
2. Melibatkan instansi terkait dalam memproses percepatan pergeseran anggaran;
3. Kerja sama dan koordinasi yang solid antar lintas sektor secara berkesinambungan;
4. Pengadaan sarana prasarana transportasi
5. Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat dan perairan

b. Faktor Penghambat :

1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
5. Belum adanya aturan/acuan tentang penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas yang baik, Sistem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;
6. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor.
7. Sumber daya manusia perhubungan yang masih terbatas

c. Upaya Tindak Lanjut:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya sesuai dengan time schedule yang telah disusun;
2. Melaksanakan kegiatan setelah proses DPA pergeseran selesai dengan segera;
3. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa;
4. Usaha penambahan anggaran dari provinsi dan pusat;
5. Usulan penambahan anggaran untuk survei ke lapangan;

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana dan belum seperti yang tergambar di Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	%	%
1	4	5	6		7		8		9		10		13		14=7+13		15=14/6x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	191,000,000	18.86	852,147,160	100%	50,932,830	0%	-	18%	8,560,000	88%	44,148,000				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya LAKIP (LPPD dan LKjIP), penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, monitoring, evaluasi dan pelaporan, laporan prognagse dan penyusunan Renja Tahun 2022	100%	50,000,000	111.81	25,708,500		12,822,030	0%	-	28%	3,496,000	0.94	11,852,000				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Tersusunnya jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD.	100%	10,000,000	99.61	25,792,500		6,932,000	0%	-	39%	2,654,000	1.08	7,408,000				

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	6,782,000				6,782,000	0%	-	2%		0.46	2,950,000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	23,000,000				9,830,000	0%	-	8%	600,000	0.98	9,390,000				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya komponen dan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		90,000,000	99.81	24,973,500		14,566,800	0%	-	13%	1,810,000	0.87	12,548,000				
2	ADMINISTRAS KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	100%	4,580,000,000			19%	4,233,627,248	19%	811,383,885	50%	2,091,807,827	6968.36526	5,853,044,995				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	100%	4,490,000,000	98.03	4,091,841,576		4,113,627,248	19%	779,783,885	50%	2,031,807,827	1.38520105	5,673,194,995				
3	Pelaksanaan Penata Usaha dan Pengujian /Ferivikasi keuangan SKPD	Tersedianya makan dan minum tamu	100%	90,000,000				120,000,000	26%	31,600,000	50%	60,000,000	1.49875	179,850,000				
4	ADMINISTRAS UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	395,000,000			6%	482,859,229	6%	29,980,360	56%	266,735,274	1.38208923	660,656,458				

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	20,000,000	100.00	3,380,000	2,586,760	0%	0%	-	0	-				
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Tangga		100%	95,000,000			37,690,200	0%	0%	-	0.22	8,161,000				
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	20,000,000	100.00	18,476,000	5,984,709	0%	0%	-	0.63	3,744,000				
8	Penyediaan Barang Cetak		100%	50,000,000	98.40	46,074,014	10,694,560	0%	28%	2,913,900	0.85	8,926,800				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	70,000,000	98.87	54,180,000	57,505,000	7%	28%	16,080,815	0.81303713	46,911,630				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	100%	550,000,000	99.99	470,073,182	368,398,000	7%	68%	247,740,559	1.61997964	592,913,028				
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	47,000,000		16%	1,055,755,588	16%	41%	433,021,518	1.24092772	1,310,278,100				

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komponen dan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	17,000,000			15,930,204	18%	2,812,070	42%	6,670,304	1.23356361	19,650,920				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	15,000,000	98.03	59,580,000	1,039,825,384	16%	164,710,117	41%	426,351,214	1.24119607	1,290,627,180				
	PEMERLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	402,000,000			0%	102,730,000	0%	-	29%	29,427,632	0.9	92,061,793			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan Dinas Jabatan.	100%	80,000,000			43,190,000	0%		60%	23,297,732	1.39	57,303,593				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	72,000,000	97.01	125,923,381	48,100,000	0%		13%	6,129,900	0.73	34,758,200				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	70,000,000			11,440,000	0%		0%	-	0	-				
	URUSAN PERHUBUNGAN		100%					#DIV/0!				#DIV/0!	-				

	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		100%	8,843,633,500				2,989,550,458	0%			0.72	2,158,040,765				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	6,770,000,000				2,611,454,458	0%		14%	557,538,998	0.83	2,354,882,911			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	100%	6,230,000,000	68.82	2,758,744,150		2,123,039,510	0%		35%	69,124,050	1.01737826	1,490,039,423			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	100%	530,000,000	98.08	6,694,494,619		488,414,948	0%		32%	488,414,948	1.09480408	864,843,488			
	Perbitan izin penyelenggaraan pembangunan Fasilitas Parkir		100%	47,000,000			57%	30,000,000	29%	8,830,000	1	18,530,000	1.79433333	53,640,000			
	Koordinasi dan Singkronisasi pengawasn pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembanguan fasilitas parkir kewenangan kab/kota		100%	47,000,000				30,000,000	29%	8,830,000	0.62	18,530,000	1.79433333	53,640,000			

	pengujian berkala kendaraan bermotor		100%	317,000,000			4%	102,885,440	4%	4,112,000	80%	82,260,472	1.74996678	180,251,384				
	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor		100%	-				26,819,000	0%	-	90%	24,062,472	1.8	48,124,944				
	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Tersedianya uji petik kendaraan bermotor	100%	27,000,000	97.79	18,367,750		19,163,940	13%	2,422,000	23%	4,298,000	1.1963832	22,636,440				
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	100%	90,000,000	74.34	58,750,000		56,902,500	3%	1,690,000	95%	53,900,000	1.92969993	109,490,000				
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan		100%	1,440,000,000			26%	225,530,560	26%	59,463,000	65%	145,675,040	1.86365828	419,213,830				
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	100%	1,400,000,000	98.29	1,198,901,179		225,530,560	26%	59,463,000	65%	145,675,040	1.86365828	419,213,830				

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya angkutan umum untuk angkutan orang dan atau barang dalam kabupaten atau kota	100%	35,000,000			0%	19,680,000	13%	2,492,000	50%	9,826,000	1.33662602	26,345,500			
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		100%	35,000,000				19,680,000	13%	2,492,000	50%	9,826,000	1.33662602	26,345,500			
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		100%	74,469,267			0%	13,334,650	112%	14,984,650	75%	9,820,000	280%	37,239,300			

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui tingkat realisasi Renja sampai bulan Juni 2023 terhadap Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 adalah sebesar 41% dengan uraian program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan 2, sub kegiatan ini sudah mencapai satu target yang ditetapkan yaitu selesainya Renja 2023 di triwulan 1.
 - b. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD. Sudah terlaksana
 - c. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Belum terlaksana
 - d. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Realisasi Fisik sampai dengan triwulan II adalah 9% dengan realisasi keuangan Rp.600.000 dari anggaran sebesar Rp. 9,830,000 (8%)
 - e. Sub. Keg. Evaluasi kinerja perangkat daerah. Realisasi fisik sampai dengan triwulan II adalah 13% dengan realisasi keuangan Rp.1.810.000 dari anggaran sebesar Rp. 14.565.800 (13%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi fisik sampai dengan triwulan II adalah 50% dengan realisasi keuangan Rp. 2,031,807,827,000 dari anggaran sebesar Rp 4,113,627,248 (50%)
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Realisasi fisik sampai dengan triwulan II adalah 50% dengan realisasi keuangan Rp.60.000.000 dari anggaran sebesar Rp120.000.000(50%)
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Ralisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp. 0
 - b. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Belum terlaksana
 - c. Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Belum terlaksana
 - d. Sub. Keg. Fasilitas Kunjng Tamu. Ralisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.16.080.815 (28%) dari anggaran Rp.57.505.000
 - e. Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Ralisasikan sampai dengan triwulan II adalah Rp.247.740.559 (68%) dari anggaran Rp.368.398.000

- 4) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Keg. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Ralisasikan sampai dengan triwulan II adalah Rp.6.670.304 (42%) dari anggaran Rp.15.930.204
 - b. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ralisasikan sampai dengan triwulan II adalah Rp.426.351.214 (41%) dari anggaran Rp.1.039.825.384
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - a. Sub Keg. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajank kendaraan perorangan Dinas Ralisasikan sampai dengan triwulan II adalah Rp.23.297.732 (60%) dari anggaran Rp.43.190.000
 - b. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Ralisasikan sampai dengan triwulan II adalah Rp.6.129.900 (13%) dari anggaran Rp.48.100.000
 - c. Sub. Keg Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp0 dari anggaran Rp.11.440.000

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp69.124.050 (2%) dari anggaran Rp.2.611.454.458
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.158.290.140 (32%) dari anggaran Rp488.414.948
- 2) Kegiatan Perbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir
 - a. Sub Keg. Koordinasi dan Singkronisasi pengawasn pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota. Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.18.530.000 (62%) dari anggaran Rp.30.000.000
- 3) Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor
 - a. Sub Keg. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor

Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.

- 24,062,472 (90%) dari anggaran Rp.26.819.000
- b. Sub Keg. Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor
Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.4.298.000 (23%) dari anggaran Rp.19.163.940
 - c. Sub. Keg Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.53.900.000 (95%) dari anggaran Rp.56.902.500
- 4) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
 - a. Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.145.675.040 (65%) dari anggaran Rp.225.530.560
 - 5) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.9.826.000(50%) dari anggaran Rp.19.680.000
3. Program Pengelolaan Pelayaran:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - a. Sub Keg. Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Realisasi sampai dengan triwulan II adalah Rp.9.820.000 (75%) dari anggaran Rp.13.334.650

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan pada anggaran tahun 2023 dengan rencana alokasi dana Rp.9.145.446.443 dan kemudia dalam perubahan anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 9.175.263.039 atau bertambah sebesar Rp. 29,816,596 setelah Perubahan dan pergeseran awal di bulan Mei 2023 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Solok dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang sama dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran awal sebesar Rp. 15.630.030 pada perubahan renja menjadi Rp.12.822.030 atau berkurang Rp 2,808,000.- efisiensi anggaran pada lembur
 - b. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD.
 - c. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - d. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Sub. Keg. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub. Keg. Fasilitas Kunjung Tamu
 - e. Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Keg. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - a. Sub Keg. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajank kendaraan perorangan Dinas
 - b. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub. Keg Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Kegiatan Perbitan izin penyelenggaraan pembangunan Fasilitas Parkir
 - a. Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasn pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota.
 - 3) Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor
 - a. Sub Keg. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor
 - b. Sub Keg. Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor
 - c. Sub. Keg Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
 - 4) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
 - a. Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
 - 5) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
3. Program Pengelolaan Pelayaran:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - a. Sub Keg. Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Solok**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Program	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
							Target Keg dan Sub keg		Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp)			
							semula	menjadi	Sebelum	menjadi		Tolak Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan		100%	6,034,812,895	6,008,776,701		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	6,034,812,895			
2	1	01	2	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	53,740,830	54,332,965	Kab. Solok		9 dokumen	53,740,830			
2	1	0	2	0	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	15,630,030	12,822,030	Kab. Solok		1 dokumen	15,630,030			
2	1	0	2	0	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 dokumen	4 dokumen	6,932,000	6,932,000	Kab. Solok		4 dokumen	6,932,000			

			0 1 2		Dokumen DPA-SKPD									
2	1 5	0 1	2 0 0 1 4	0 0 0 1 4	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	6,782,000	6,782,000	Kab. Solok		4 dokumen	6,782,000
2	1 5	0 1	2 0 0 1 6	0 0 0 1 6	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	4 dokumen	4 dokumen	9,830,000	9,830,000	Kab. Solok		4 dokumen	9,830,000
2	1 5	0 1	2 0 0 1 7	0 0 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	14,566,800	17,966,935			4 dokumen	14,566,800
2	1 5	0 1	2 0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen	14 dokumen	4,333,627,248	4,187,089,094			14 dokumen	4,333,627,248
2	1 5	0 1	2 0 0	0 0 0	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	65 orang	4,213,627,248	4,063,189,094	Kab. Solok		65 orang	4,213,627,248

			00										
			21										
2	1	0	20	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan	120,000,000	123,900,000	Kab. Solok		12 laporan	120,000,000
			00										
			23	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				488,959,229	510,723,229	Kab. Solok			488,959,229
				Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12 Paket	12 Paket	3,686,760	3,686,760	Kab. Solok		12 Paket	3,686,760
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Tangga		4 Paket	4 Paket	37,690,200	37,690,200	Kab. Solok		4 Paket	37,690,200
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 Paket	12 Paket	5,984,709	5,984,709	Kab. Solok		12 Paket	5,984,709
				Penyediaan Barang Cetak		12 Paket	12 Paket	10,694,560	10,694,560	Kab. Solok		12 Paket	10,694,560
				Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	62,505,000	68,005,000	Kab. Solok		12 Laporan	62,505,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	12 Laporan	12 Laporan	368,398,000	384,662,000	Kab. Solok		12 Laporan	368,398,000

				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	1 Unit	11,440,000	11,440,000	Kab. Solok		1 Unit	11,440,000
				URUSAN PERHUBUNGAN			100%	3,095,648,898	3,153,151,688	Kab. Solok		100%	3,095,648,898
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				3,095,648,898	3,153,151,688	Kab. Solok			3,095,648,898
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a		12 laporan	12 laporan	2,709,500,098	2,745,120,458	Kab. Solok		12 laporan	2,709,500,098
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	190 Unit	190 Unit	2,197,000,000	2,262,535,510			190 Unit	2,197,000,000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	10 Unit	10 Unit	512,500,098	482,584,948	Kab. Solok		10 Unit	512,500,098
				Perbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir		12 laporan	12 laporan	30,000,000	30,000,000	Kab. Solok		12 laporan	30,000,000

					Koordinasi dan Singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota		12 laporan	12 laporan	30,000,000	30,000,000	Kab. Solok		12 laporan	30,000,000
					pengujian berkala kendaraan bermotor				102,885,440	102,885,440	Kab. Solok			102,885,440
					Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor		3 orang	1 orang	26,819,000	26,819,000	Kab. Solok		1 orang	26,819,000
					Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Tersedianya uji petik kendaraan bermotor	5500 Unit	5500 Unit	19,163,940	19,163,940			5500 Unit	19,163,940
					Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	10 Unit	10 Unit	56,902,500	56,902,500	Kab. Solok		10 Unit	56,902,500
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan		12 laporan	12 laporan	228,263,360	255,465,790	Kab. Solok		12 laporan	228,263,360

					Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	12 laporan	12 laporan	228,263,360	255,465,790	Kab. Solok		12 laporan	228,263,360
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya angkutan umum untuk angkutan orang dan atau barang dalam kabupaten atau kota	4 laporan	4 laporan	25,000,000	19,680,000	Kab. Solok		4 laporan	25,000,000
					Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		4 laporan	4 laporan	25,000,000	19,680,000	Kab. Solok		4 laporan	25,000,000
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau		4 laporan	4 laporan	14,984,650	13,334,650	Kab. Solok		4 laporan	14,984,650

				Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggara an Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	terlaksananya penyelenggaraan angkutan sungai dan danau	4 laporan	4 laporan	14,984,650	13,334,650	Kab. Solok		4 laporan	14,984,650

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja penting dalam menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan/stakeholder.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Pangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh instansi terkait, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Sumatera Barat maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas).

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan SKPD pada tahun 2023, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan



arahan bagi stakeholder pembangunan Perhubungan untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan.

Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perwujudan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Koto Baru, 01 September 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok**



MUHAMMAD DJONI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19760102 199703 1 003

--	--